



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 6
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja/ ke - 3
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 14 Juni 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN RKP Tahun Anggaran 2018
Hadir	: 1. orang dari 50 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas “**Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,**” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp553.849.035.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program sebagai berikut:

Program	Pagu Indikatif (dalam ribuan)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	120.496.100
2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	211.293.100
3. Program Perlindungan Anak	190.772.600
4. Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.287.200
Total	553.849.035

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 tersebut bersama Pejabat Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

2. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
 - a. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menyampaikan kepada Presiden RI agar tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah berubah menjadi kementerian yang program dan kegiatannya fokus menangani langsung berbagai masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Alokasi anggaran untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hendaknya dilakukan evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga lain yang terkait.
 - c. Dalam menyusun program dan dukungan anggaran selain didasarkan pada skala prioritas juga kebutuhan mendesak dari data yang akurat dan valid.
 - d. Kebijakan, Program dan kegiatan yang disusun memberikan deskripsi target sasaran, berdasarkan target, input, proses dan out come yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
 - e. Menyusun pemetaan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai daerah secara menyeluruh dan komprehensif.
 - f. Meningkatkan kebijakan dan memperkuat sistem dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dukungan anggaran yang memadai.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar meningkatkan alokasi anggaran program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyusun dan memberdayakan model-model untuk memperkuat pelaksanaan tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.

